

## **IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUM KAMPUNG) DI KAMPUNG TUMANG KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK**

**Anuar Sadat,<sup>1</sup> Ledi Prahmana<sup>2</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara

e-Mail: [anuar.sadat@fisip.uisu.ac.id](mailto:anuar.sadat@fisip.uisu.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Village-Owned Enterprises (BUM Kampung) are a pillar of economic activities in the village that function as social institutions and commercial institutions. As an indicator to regulate the economy in the village. The formulation of the problem in this study are: 1. How to Implement the Village-Owned Enterprises (BUMKampung) Program in Tumang Village, Siak District, Siak Regency. 2. What is the Function of the Kampung (BUMKampung) Village of Tumang, Siak District of Siak Regency and How is the Analysis of BUMKampung Program Policy Implementation. The objectives of this study were: 1) To find out the Program of Village Owned Enterprises (BUMKampung) in Tumang Village, Siak Subdistrict, Siak Regency, 2) Know the Implication of the Policy of Village-Owned Enterprises (BUM Kampung) in Tumang Village, Siak District, Siak Regency and Find Conclusions on Implementation Analysis Program Policies for Village Owned Enterprises (BUM Kampung) in Tumang Village, Siak District, Siak Regency. The method used in this research is descriptive qualitative data that is qualitative in a holistic analysis, the classification of data used in this study is Primary data, data obtained by interviewing informants, the public, and management of BUM Kampung in Kampung Tumang. Data was collected using techniques: observation, interviews, literature study, documentation studies, research informants. The results of this study concluded that the implementation of the BUM Kampung program had gone well.*

**Keywords:** *BUM Kampung,*

### **1. Pendahuluan**

Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung) bukanlah program baru untuk Kampung. Upaya pemerintah dalam menggerakkan ekonomi desa sudah dilakukan sejak dikeluarkannya kebijakan tentang Desa mulai pra reformasi sebelum tahun 1998 dan paska reformasi setelah tahun 1998 hingga saat sekarang ini. Tetapi upaya pemerintah ini belum membuahkan hasil yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari presentase penduduk miskin yang relatif terdapat banyak terdapat

dipedesaan. Prosentase penduduk miskin didaerah pedesaan naik dari 13,76% pada september 2014 menjadi 14,21% maret 2015 (BPS , 2015). Kondisi ini menggambarkan bahwa sumberdaya-sumberdaya yang ada di Desa belum dikelola dengan baik.

Kampung (Desa) merupakan agen Pemerintah yang terdepan dalam melaksanakan pembangunan, karena pembangunan ditingkat desa berkenaan langsung dengan masyarakat sesuai dengan amanat ekonomi daerah.

Dalam mendorong pembangunan di tingkat Kampung (Desa) pemerintah memberikan kewenangan meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah Kampung (Desa), pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan masyarakat Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung. Kewenangan Kampung terkait dengan pemberdayaan Kampung berdampak pada pembangunan Kampung. Bahwa pemerintah mau tidak mau harus kreatif dalam menjawab hambatan dan tantangan pembangunan Kampung. Pemerintah desa berwenang untuk mengelolah desanya secara mandiri salah satu caranya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada ditingkat Kampung/Desa yaitu Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung). Program BUM Kampung ini menjadi salah satu yang diamanatkan didalam kebijakan pemerintah terkait dengan Kampung untuk kesejahteraan masyarakat Kampung.

Berbagai upaya untuk memajukan dan mensejahterakan Kampung telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan sampai pada titik kulminasi pencapaian dengan diundangkannya undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yang dinilai sebagai kebijakan paling progresif sepanjang sejarah perjuangan Desa.

Terbentuknya Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) merupakan salah satu dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk mendukung kegiatan pemerintah dan pembangunan Kampung. Pemberdayaan dilakukan dengan mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Kampung secara berkelanjutan dengan mendayaguna sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Kampung.

Lembaga berbasis ekonomi ini (BUM Kampung) menjadi salah satu program yang dijalankan pemerintah Desa sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan Pendapatan asli Desa (PADes). Peran BUMKampung sebagai instrumen penguatan ekonomi Kampung dan juga sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat Kampung.

Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) sebagai instrumen otonomi Kampung/Desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintahan Kampung/Desa dalam mengembangkan potensi Kampungnya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan Kampung/Desa.

Karenanya BUMKampung/BUMDes) paska UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diikuti dengan PP RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaanya, terkhusus terkait dengan BUMDes/BumKampung sesuai dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang BUMDes. Bila menghitung tahunnya maka BUMDesa sampai tahun 2017 sudah masuk usia yang ke 3 Tahun.

Program Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)/BUMKampung, di wilayah Kabupaten Siak dikenal dengan nama Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung). Pelaksanaan BUM Kampung di Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak sesuai dengan Peraturan Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak Nomor : 03 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung).

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) di Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Kedua, bagaimana Fungsi Badan Usaha Milik

Kampung (BUMKampung) di Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini yaitu analisa Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) di Kampung Tumang Kecamatan Siak ini memerlukan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan konseptual. Di samping itu, pendekatan kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi dan situasi yang berubah-ubah selama penelitian berlangsung.

Lokasi penelitian yang diamati berada pada kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Kampung Tumang ialah sebagian penduduknya bermata pencaharian berdagang, Petani dan juga berkebun. Oleh sebab itu dari kegiatan ekonomi tersebut,

masyarakat Kampung Tumang sangat membutuhkan dana dan modal.

Sekretariat Kantor Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung) Kampung Tumang berada satu atap dengan Kantor Kepala Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

## 2. PEMBAHASAN

Implementasi Program Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) di Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak menggunakan teori implementasi menurut Van Metter dan Van Horn. Dalam Teori Van Metter dan Van Horn, proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

### Ukuran dan Tujuan Kegiatan

Dimensi 1		Hasil	
Ukuran dan Tujuan Kegiatan		baik	
No.	Temuan Lapangan	Kategori	
1.	Awal mula Kebijakan Program BUMKampung	a. Dibuatnya Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menganjurkan desa memiliki BUMDes/BUMKampung	Baik
		b. Dipertegas dengan dibuatnya Permendagri No. 39 Tahun 2010	Baik
		c. Di kabupaten Siak baru dikenal pada tahu 2007	Baik
		d. Terlambatnya pembuatan Perda dan Perbup	Kurang Baik
2.	Kejelasan ukuran dan tujuan Kebijakan Program BUMDes/BUMKampung	a. Tujuan program BUMDes/BUMKampung di Desa Tumang menurut Perdes No. 18 Tahun 2007 belum tercapai optimal	Kurang Baik
3.	Langkahlangkah Program BUM Kampung	a. Membentuk pelaksana operasional BUMKampung dan Peraturan Kampung	Baik
		b. Membuat program kerja utama dan tambahan	Baik

		c. Menjalankan program kerja dengan dana PNPM	Baik
--	--	---	------

### Sumber Daya

Dimensi 2			Hasil
Sumber Daya			Baik
No.	Temuan Lapangan		Kategori
1.	Kondisi sumber daya manusia	a. Secara Kuantitas, Sumber daya manusia yang ada masih perlu peningkatan b. Secara kualitas, Sumber daya Manusia sebagian perlu pelatihan dalam menggunakan kecanggihan teknologi c. Sumber daya Manusia yang ada mengelola BUMKampung perlu pelatihan tata kelola/ manajemen	Baik  Baik  Baik
2.	Kondisi sumber daya non-manusia	a. Bantuan dana BUMKampung berasal dari dana Kampung, APBN dan APBD dan bantuan dana lain b. Belum ada bantuan CSR yang signifikan	Baik  Tidak Baik
3.	Kondisi sumber daya waktu dalam melaksanakan Program Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung)	a. Perlunya seleri yang baik dalam pelaksanaan operasional BuM Kampung b. Adanya Standarisasi gaji dan perlunya peningkatan motivasi	Baik  Baik

### Hubungan antar Organisasi

Dimensi 3			Hasil
Hubungan Antar Organisasi			Baik
No.	Temuan Lapangan		Kategori
1.	Melaksanakan komunikasi vertical	a. Adanya hubungan dua arah antara Pemerintah kampung dan Pemerintah Kabupaten. b. Adanya pendampingan oleh Pemerintah Kabupaten	Baik  Baik
2.	komunikasi horizontal dalam melaksanakan Program BUM Kampung	a. Hubungan antara pemerintah kampung dan BUMKampung berjalan b. BUMKampung dan Masyarakat kampung saling mendukung dan berinteraksi	Baik  Baik

### Karakteristik Agen Pelaksana

Dimensi 4			Hasil
Karakteristik Agen pelaksana			Baik
No.	Temuan Lapangan		Kategori
1.	Perhatian agen pelaksana dalam pelaksanaan Kebijakan	a. Mindset masyarakat kampung Tumang cenderung tradisional ke arah pembangunan b. Individu Pelaksananya perlu gaji yang standar	Baik

	Program BUM Kampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Perlunya tambahan dana dalam pelaksanaan unit usaha simpan pinjam</li> <li>d. Belum optimalnya sosialisasi pemerintah kampung kepada masyarakat kampung</li> </ul>	<p>Baik</p> <p>Baik</p> <p>Baik</p>
2.	Agen pelaksana yang dilibatkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pelaksana Operasioanal BUMKampung</li> <li>d. Pemerintah Kampung</li> <li>e. Lembaga-lembaga Kampung (BKM, PKK, Karangtaruna, LPM, dll)</li> </ul>	<p>Baik</p> <p>Baik</p> <p>Baik</p>

### Kondisi Sosial, EkonoMo dan Politik

Dimensi 5			Hasil
Kondisi social, ekonomi dan politik			Baik
No.	Temuan Lapangan		Kategori
1.	Kondisi berkembangnya wilayah perkotaan yang berdampak pada Kampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perkembangan wilayah merubah aktivitas masyarakat kampung.</li> <li>b. Besarnya peluang untuk bekerja mengurangi pengangguran</li> </ul>	<p>Baik</p> <p>Baik</p>
2.	Kondisi kesenjangan ekonomi sehingga kesenjangan antara kaya dan miskin semakin tajam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya BUMKampung sebagai peluang memberdayakan masyarakat</li> <li>b. LSM dan parpol mendukung Program BUM Kampung</li> </ul>	<p>Baik</p> <p>Baik</p>

### Disposisi Implementer

Dimensi 6			Hasil
Disposisi Implementor			baik
No.	Temuan Lapangan		Kategori
1.	Penguatan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dibentuknya Pelaksana Operasional BUMKampung yang disahkan oleh SK Kepala Kampung</li> <li>b. Dibentuknya Peraturan Kampung sebagai acuan dasar</li> <li>c. Dibentuknya AD ART sebagai Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BUM Kampung</li> </ul>	<p>Baik</p> <p>Baik</p> <p>Baik</p>
2.	Sikap pelaksana dalam menjalankan Program BUMKampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bergulirnya program simpan pinjam dan meningkat dari waktu ke waktu</li> <li>b. Masyarakat merasakan manfaat dari program simpan pinjam BUM Kampung</li> <li>c. Minat masyarakat terhadap bank keliling sudah sangat berkurang</li> </ul>	<p>Baik</p> <p>Baik</p> <p>Baik</p>
3.	Respon agen pelaksana terhadap Kebijakan Program BUM Kampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dibuatnya sosialisasi BUM Kampung ditingkat daerah melalui APDESI</li> <li>b. Dibuatnya program pelatihan BUM Kampung meski hanya menyentuh beberapa desa</li> </ul>	<p>Baik</p> <p>Baik</p>

		c. Perlu simultan dilakukan sosialisasi menyeluruh BUMKampung ditingkat daerah	Baik
--	--	--	------

### 3. PENUTUP

Secara ringkas kesimpulan ini penelitian ini adalah :

- 1) Program Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) di Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak pada Program Simpan Pinjam berjalan dengan baik
- 2) Implementasi program Badan Usaha Milik Kampung ( BUMKampung) di Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak sebagai berikut :
  - a. Sebagai motor pergerakan perekonomian di Kampung.
  - b. Meningkatkan potensi yang ada di desa.
  - c. Sebagai wadah usaha mikro dan kecil (UMK) yang terdapat di kampung
- 3) Fungsi Badan Usaha Milik Kampung ( BUMKampung) di Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak sebagai berikut :
  - a. BUMKampung sebagai Badan Usaha yang di kelola oleh sekelompok orang yang di tunjuk dan di percayai oleh pemerintah kampung untuk menggali potensi kampung dan memajukan perekonomian kampung dengan terstruktur dan termenej.
  - b. Mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di pedesaan.
- 4) Dalam Implementasi Badan Usaha Milik Kampung ( BUMKampung) di kampung Tumang Kecamatan Siak

Kabupaten Siak terdapat hambatan-hambatan di antaranya :

- a. Perlunya peningkatan SDM untuk melakukan program Badan Usaha Milik kampung (BUM Kampung).
- b. Perlunya peningkatan dalam menejemen pelaksanaan BUMKampung
- c. Sumberdaya finansial yang ada perlu didukung dan ditambah dalam pelaksanaan program BUM Kampung karena besarnya kebutuhan modal di masyarakat kampung
- d. Komunikasi sudah baik dan terus ditingkatkan oleh para Lembaga Desa, terutama para pelaksana BUM Kampung.
- e. Kurang maksimalnya sosialisasi program BUM Kampung ini baik sosialisasi Pemerintah Daerah ke kampung-kampung mengenai kebijakan BUM Kampung maupun sosialisasi Pemerintah Kampung kepada masyarakat kampung mengenai program BUM Kampung.

### DAFTAR PUSTAKA

- B Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

- Anggara, Sahya, 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung, CV. Pustaka Setia.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Peraktik*. PT. Rineke Cipta, Jakarta, 2010.
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Kencana, Jakarta : 2009
- Budi Winarno. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Press. Yogyakarta, 2005.
- Charles O. Jones. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Rajawali, Jakarta : 1991.
- Dunn, W. N. *Kebijakan Publik*. Pancur Siwah, Jakarta, 2002.
- Effendi, Sofyan. *Metodologi Penelitian Survei*. LP3ES, Jakarta, 1993.
- Hasibuan, H. Malayu SP. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Lexy. J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung, 2000.
- Leo Agustino. *Politik dan Kebijakan Publik*. AIPI. Bandung, 2006.
- Maryuani, 2008. *Pembangunan Bumdes dan pemberdayaan Pemerintah Desa*.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Nugroho D. Riant, 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Pane D. Leedy. *Practical Research : Planning And Design*. New York: Macmillan, 1980.
- Prastowo A. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta, 2012.
- Siagian, S. P. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Gunung Agung, Jakarta, 1993.
- Surachmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Tarsito, Bandung, 1992.
- Soehartono. *Metode Penelitian Sosial*. PT Rosdakarya. Jakarta, 2009
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung, 2011.
- Sugiyono. *Metode Observasi Dan Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif*. Ghalia, Jakarta, 2009.
- William N. Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada university Press, Yogyakarta, 2003.